

SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sri Wahyu Handayani

Universitas Gunadarma, yani@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai keunggulan komparatif dalam prosedur pelayanan simpel, proses kilat, skim kredit fleksibel, pendekatan personal sebab posisi kantor dekat dengan pasar/ nasabah. Melalui karakteristik operasional yang khusus, membolehkan BPR menjangkau serta melayani usaha mikro serta warga pedesaan. Dengan demikian ialah langkah yang pas bila Bank Indonesia menetapkan kalau keberadaan BPR wajib sanggup membagikan khasiat yang besar untuk warga serta perekonomian wilayah. Dibanding dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) nonbank, BPR mempunyai keunggulan berbentuk pengaturan, pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia. Sehingga diharapkan BPR mempunyai mutu tata kelola (governance), manajemen serta operasional yang sehat serta handal. Postingan ini menganalisis lebih dari 50% nilai kredit, sumbangan pemberian kredit, resiko serta keadaan ekonomi yang diberikan kepada nasabah serta analisis sistem aplikasi pemberian kredit mikro lebih dari 40% menggunakan pc serta database nasabah.

Kata kunci: Penilaian Kredit, Deskripsi Kredit, Bank Perkreditan Rakyat

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pelaksanaan manajemen resiko pada usaha perbankan, menegaskan kita pada krisis moneter di pertengahan 1997 yang merontokan beberapa bank di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sudah lengah mempraktikkan manajemen resiko secara efisien, sehingga pada kesimpulannya kita wajib menelan kerugian moril serta materil yang sangat dramatis. Wajib disadari kalau bank yang mempunyai bisnis inti mengumpulkan dana pihak ketiga serta mengelolanya lewat kredit, merupakan lembaga yang sangat rentan terhadap kegagalan. Tetapi bila terjalin kegagalan pada sistem perbankan hingga akibatnya bukan cuma dialami oleh sistem tersebut, namun apalagi pada sistem perekonomian secara mikro serta makro. Oleh sebab itu, otoritas moneter di negeri manapun memiliki kepentingan buat mengendalikan serta mengawasi sistem perbankannya.

Sebagian besar kendala pada bank disebabkan oleh ketakutan akan

kegagalan bank dan kerentanan bank terhadap salah urus sebagai akibat dari rasio modal terhadap aset yang biasanya rendah. Dalam hal ini memberikan gambaran bahwa penyebab kegagalan bank bukan hanya karena adanya perubahan iklim usaha, tetapi juga karena salah pengelolaan (*mismanagement*).

Akibatnya, pelaksanaan kebijakan moneter di Amerika Serikat pada intinya melibatkan elemen penting dari manajemen risiko, sebuah proses yang membutuhkan pemahaman tentang banyak sumber risiko dan ketidakpastian yang dihadapi pembuat kebijakan dan kuantifikasi risiko tersebut bila memungkinkan. Manajemen risiko tidak hanya harus diterapkan dalam lembaga keuangan saja, tetapi juga dalam lembaga otoritas moneter. Ini berarti manajemen risiko yang diterapkan dalam lembaga keuangan juga merupakan bagian dari manajemen risiko yang diterapkan dalam lembaga otoritas moneter.

Menyadari hendak perihal tersebut, Bank Indonesia menghasilkan bermacam pesan edaran serta peraturan menimpa pelaksanaan manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank. Kebijakan ini memforsir bank buat mulai menjadikan manajemen resiko selaku bagian dari penataan rencana strategis. Manajemen resiko memanglah mempunyai isi bayaran, hendak namun bisa mereduksi mungkin kegagalan yang pada kesimpulannya mendatangkan laba untuk bank. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia dalam pilar ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengatakan sasaran yang mau dicapai merupakan menghasilkan industri perbankan yang kokoh serta mempunyai energi saing yang besar dan mempunyai ketahanan dalam mengalami resiko.

API menyebutkan bahwa di dalam struktur perbankan Indonesia ada empat strata bank, ialah bank internasional yang mempunyai kapasitas serta keahlian beroperasi di daerah internasional serta mempunyai modal diatas Rp 50 triliun; bank nasional yang mempunyai cakupan usaha sangat luas serta beroperasi secara nasional dan mempunyai modal antara Rp 10 triliun s/ d Rp 50 triliun; bank dengan fokus usaha tertentu yang aktivitas usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu cocok dengan kapabilitas serta kompetensi tiap- tiap bank dan mempunyai modal antara 100 miliar hingga dengan Rp 10 triliun; Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta bank dengan aktivitas usaha terbatas yang mempunyai modal di dasar Rp 100 miliar. Dari ke 4 strata bank tersebut di atas, periset tertarik melaksanakan riset resiko pemberian kredit mikro pada BPR, yang hingga dikala ini masih butuh atensi dalam perihal kenaikan profesionalisme perbankan (core banking skills) serta tata kelola industri (*corporate governance*).

Sejak dikeluarkannya PAKTO 1988 yang membagikan kesempatan pendirian BPR dengan modal minimum Rp 50 juta, jumlah BPR di Indonesia bertambah menggapai 1512 BPR (akhir tahun 1992) yang tadinya cuma 423 BPR (akhir September 1988). Pada dikala krisis moneter mendera Indonesia, energi tahan BPR terbukti dengan memandang angka 2140 BPR pada akhir tahun 1997 jadi 2419 BPR pada akhir tahun 2000. Walaupun semenjak tahun 2001 s/ d Juli 2006 Bank Indonesia sudah melaksanakan pencabutan izin usaha terhadap 249 BPR serta merger 306 BPR jadi 26 BPR, tetapi jumlah kantor BPR pada kurun waktu yang sama malah hadapi kenaikan dari 2432 BPR jadi 3157 BPR. Perihal ini menampilkan kalau penyusutan jumlah BPR tidak kurangi jangkauan pelayanan BPR kepada warga.

BPR mempunyai keunggulan komparatif dalam perihal prosedur pelayanan simpel, proses kilat, skim kredit fleksibel, pendekatan personal serta 'jemput bola' sebab posisi kantor dekat dengan nasabah. Dengan ciri operasional yang khusus tersebut, membolehkan BPR menjangkau serta melayani UMK serta warga pedesaan. Dengan demikian ialah langkah yang pas bila Bank Indonesia menetapkan kalau keberadaan BPR wajib sanggup membagikan khasiat yang besar untuk warga serta perekonomian wilayah. Dibanding dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) nonbank, BPR mempunyai keunggulan berbentuk pengaturan, pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia. Sehingga diharapkan BPR mempunyai mutu tata kelola (*governance*), manajemen dan operasional yang sehat dan profesional. Namun mengingat 78,3% BPR tersebar di pulau Jawa dan Bali, maka peningkatan penyebaran dan jangkauan BPR yang merata terutama

di luar pulau Jawa dan Bali menjadi tantangan tersendiri bagi BPR.

Pada sisi lain, jika kita melihat dari sisi keuangan, rata-rata *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR selama 2001 s/d Juli 2012 adalah 77,9%, jauh lebih besar dibandingkan dengan bank umum yang hanya 47,7%. Hal ini berarti BPR lebih mampu menyalurkan dana yang dimilikinya. Tetapi jika kita melihat rata-rata (NPL) BPR pada periode yang sama adalah sebesar 8,9%, sementara bank umum memiliki rata-rata NPL lebih kecil yaitu 7,8%. Sedangkan rata-rata *Return On Asset* (ROA) BPR pada periode tersebut mencapai 3,3%, lebih baik dibandingkan bank umum yang mencapai 2,4%. Data tersebut menunjukkan produktifitas BPR yang lebih baik dari pada bank umum, hanya saja BPR masih perlu perhatian dalam hal menurunkan NPLnya.

Oleh karena itu, Bank Indonesia, melalui program kerjanya dalam Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat, mendorong penerapan manajemen risiko dalam tata kelola operasional dengan dukungan teknologi informasi. Maka dalam artikel ini ingin dilakukan penelitian yang menghasilkan konsep penerapan manajemen risiko dalam penyaluran kredit BPR berbasis teknologi informasi. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keinginan menjadikan BPR sebagai bagian dari lembaga keuangan perbankan yang mampu melayani seluruh kebutuhan kredit mikro masyarakat Indonesia dengan dukungan operasional yang sehat dan profesional berbasis teknologi informasi.

Penelitian ilmiah ini membahas tentang faktor utama apa saja yang mempengaruhi Bank Perkreditan Rakyat di Kota Depok dalam menilai kelayakan pemberian kredit usaha mikro dan sistem pemberian kredit usaha mikro berbasis teknologi informasi pada Bank Perkreditan

Rakyat di Kota Depok dalam menganalisis risiko pemberian kredit mikro. Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah mengetahui faktor utama apa saja yang mempengaruhi Bank Perkreditan Rakyat di Kota Depok dalam menilai kelayakan pemberian kredit usaha mikro dan mengetahui peran sistem pemberian kredit usaha mikro berbasis teknologi informasi dapat memberikan keuntungan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Depok dalam menganalisis risiko pemberian kredit mikro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Didalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi dari objek penelitian, serta menggambarkan berbagai aspek dari perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis yang didalamnya meliputi prosedur pemberian kredit usaha mikro. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat di Kota Depok. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS, dimana yang digunakan merupakan prosedur frekuensi untuk menampilkan distribusi frekuensi dari setiap nilai data. Dalam hal ini, distribusi frekuensi ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram batang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Kredit per Nasabah dan Analisis Kredit BPR

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa BPR menyalurkan lebih dari 50% dananya untuk kredit produktif, ternyata hal ini sejalan dengan nilai kredit yang diberikan kepada masing-masing nasabah. Tabel.1 memperlihatkan bahwa 30% BPR memberikan kredit dengan nilai kurang dari 10 juta, sementara itu 55% BPR memberikan kredit dengan nilai 10 juta s/d 50 juta untuk setiap

nasabahnya. Hanya 15% BPR yang memberikan kredit lebih dari 50 juta kepada nasabahnya.

Tabel 1, diketahui bahwa dalam penilaian nilai kredit per nasabah pihak BPR melakukan pertimbangan yang ada untuk mengurangi risiko kegagalan kredit, BPR melakukan analisis kredit yang menjadi dasar keputusan pemberian kredit. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama BPR dalam memutuskan pemberian kredit.

Tabel 2, diketahui bahwa pertimbangan utama BPR dalam pemberian kredit terdiri dari empat meliputi karakter calon nasabah, kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit, jenis dan nilai agunan yang dijaminkan oleh nasabah dan jenis usaha/ pekerjaan yang dijalani nasabah. Dari keempat frekuensi terbesar adalah pertimbangan tersebut untuk memperlihatkan bahwa 65% BPR memberikan perhatian serius terhadap kemampuan nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

Tabel 3, Hal ini mejadi pertimbangan utama BPR dalam proses analisis kredit untuk memutuskan pemberian kredit. Berkaitan dengan data pribadi nasabah 100% BPR hanya mempertimbangkan jenis usaha/pekerjaan nasabah.

Tabel 4, diketahui bahwa risiko nasabah paling rendah berdasarkan jenis usaha/pekerjaan memperlihatkan bahwa untuk menilai risiko kegagalan kredit berdasarkan jenis usaha/pekerjaan nasabah, 45% BPR menilai bahwa nasabah dengan status wirausaha memiliki risiko paling rendah, sementara itu 35% BPR menilai bahwa nasabah dengan status pegawai negeri sipil/ABRI memiliki risiko paling rendah.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa hal ini sejalan dengan data sebelumnya

yang memperlihatkan bahwa lebih dari 50% dana BPR disalurkan untuk kredit produktif. Sementara itu dalam hal agunan, 75% BPR menilai jenis agunan deposito bank adalah agunan dengan risiko paling rendah. Namun diluar analisis kredit yang berkaitan dengan nasabah, 95% BPR berpendapat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia mempengaruhi pengembalian kredit nasabah.

Tabel 6, diketahui bahwa kondisi perekonomian mempengaruhi pengembalian kredit nasabah memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian mempengaruhi pengembalian kredit nasabah menyatakan setuju sebesar 55% dan yang menyatakan sangat setuju 40%.

Pemanfaatan Perangkat Sistem Komputer

Tabel 7 memperlihatkan bahwa perangkat sistem komputer dapat dimanfaatkan untuk membantu operasional BPR sehari-hari. Khusus dalam sistem pemberian kredit, perangkat sistem komputer diharapkan mampu melakukan analisis risiko kredit yang disalurkan BPR. Baru 40% BPR yang memiliki perangkat komputer yang dilengkapi dengan sistem aplikasi kredit dan terkoneksi dengan SID BI

Tabel 7, memperlihatkan bahwa namun keberadaan sistem komputer pun baru dirasakan manfaatnya sebagai alat untuk mempercepat proses administrasi oleh 40% BPR dan menyimpan database nasabah oleh 35% BPR. Hanya 5% BPR yang merasakan manfaat penerapan sistem komputer untuk mempermudah proses analisis kredit dan hanya 20% BPR yang merasakan manfaat penerapan sistem komputer untuk mengurangi risiko kredit.

Tabel 1.
Nilai kredit per nasabah yang diberikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 10 juta	6	30.0	30.0	30.0
	10 s.d 50 juta	11	55.0	55.0	85.0
	50 s.d 100 juta	2	10.0	10.0	95.0
	> 100 juta	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 2.
Pertimbangan utama BPR dalam pemberian kredit

		Frequency	percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karakter calon nasabah	4	20.0	20.0	20.0
	Kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit	13	65.0	65.0	85.0
	Jenis dan nilai agunan yang dijaminkan oleh nasabah	1	5.0	5.0	90.0
	Jenis usaha/pekerjaan yang dijalani nasabah	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 3.
Pertimbangan utama BPR dalam pemberian kredit berkaitan dengan data pribadi nasabah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jenis usaha/pekerjaan nasabah	20	100.0	100.0	100.0

Tabel 4.
Risiko nasabah paling rendah berdasarkan jenis usaha/pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai negeri sipil/ABRI	7	35.0	35.0	35.0
	Pegawai swasta	2	10.0	10.0	45.0
	Wirausaha	9	45.0	45.0	90.0
	Jalur profesional (dokter, dosen, penegak hukum, dll)	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 5.
Risiko agunan yang paling rendah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tanah/bangunan	3	15.0	15.0	15.0
	Kendaraan bermotor	1	5.0	5.0	20.0
	Deposito bank	15	75.0	75.0	95.0
	Surat kuasa pemotongan gaji	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 6.
Kondisi perekonomian mempengaruhi pengembalian kredit nasabah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	8	40.0	40.0	40.0
	Setuju	11	55.0	55.0	95.0
	Tidak setuju	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 7.
Perangkat sistem komputer untuk sistem pemberian kredit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Seperangkat komputer standar atau tidak menggunakan sama sek	3	15.0	15.0	15.0
	Seperangkat komputer yang memiliki sistem aplikasi kredit	5	25.0	25.0	40.0
	Seperangkat komputer yang terkoneksi dengan SID – BI	4	20.0	20.0	60.0
	Seperangkat komputer, sistem aplikasi kredit, terkoneksi dengan SID BI	8	40.0	40.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tabel 8.
Keuntungan perangkat sistem komputer untuk sistem pemberian kredit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mempercepat proses administrasi	8	40.0	40.0	40.0
	Memiliki database nasabah	7	35.0	35.0	75.0
	Mempermudah proses analisis kredit	1	5.0	5.0	80.0
	Mengurangi risiko kredit macet	4	20.0	20.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal analisis kredit yang dilakukan BPR, penilaian kemampuan nasabah mengembalikan kredit adalah hal yang paling utama menjadi perhatian BPR. Nasabah yang memiliki usaha sendiri atau nasabah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil/ABRI dengan penghasilan tetap lebih disukai BPR untuk diberikan kredit. Hal ini menggambarkan belum diterapkannya prinsip 6C sebagai paket lengkap yang digunakan BPR untuk menilai kelayakan kredit. Namun kondisi perekonomian di Indonesia sudah menjadi perhatian tersendiri bagi BPR karena dianggap dapat mempengaruhi kegagalan kredit nasabah.

Sedangkan dalam hal penerapan sistem komputer dalam sistem kredit, secara umum BPR belum memanfaatkannya sebagai alat untuk mempermudah proses analisis kredit dan menekan risiko kredit macet. Dengan sistem aplikasi analisis kredit yang tepat dan koneksi ke Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, harusnya sistem komputer dapat memberikan manfaat yang lebih dari sekedar mempercepat proses administrasi dan merekam database nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2006), *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta
_____, (2003), *Arsitektur Perbankan Indonesia*, Jakarta.